



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	13
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																			

2021, Pendapatan Daerah Limapuluh Kota Naik 4,24 Persen

Limapuluh Kota, Padek—Kendati di bayang-bayangi pandemi Covid-19, Kabupaten Limapuluh Kota mampu membukukan kenaikan pendapatan daerah pada tahun 2021 hingga 4,24 persen. Bahkan predikat keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap bisa diwujudkan sampai 7 tahun berturut-turut.

"Semoga ini bisa menjadi cerminan kinerja yang baik dari Pemkab Limapuluh Kota dan geliat kembali ekonomi masyarakat mulai pulih usai diterpa pandemi covid-19," jelas Bupati Limapuluh Kota Safaruddin.

Sebelumnya, pada penyampaian Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP), pendapatan daerah Kabupaten Limapuluh Kota meningkat. "Dari target pendapatan daerah Rp 1,323 triliun terealisasi sebesar Rp 1,260 triliun atau 95,29 persen, namun dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi peningkatan penerimaan pendapatan sebesar 4,24 persen.

Sementara pada kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemkab Limapuluh Kota pada tahun 2021 untuk ketujuh kalinya memperoleh predikat tertinggi WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

"Peningkatan penerimaan pendapatan sebesar 4,24 persen atau sebesar Rp 51 miliar lebih berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah," ujar Safaruddin.

Kemudian, terdapat realisasi sebesar 93,77 persen dari segi Belanja dan Transfer. Sehingga secara akuntansi terdiri atas Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga.

Dari target Rp 1.350 triliun lebih terealisasi sebesar Rp 1.266 triliun. Sementara itu,

dari segi Belanja Modal terealisasi sebesar 88,20 persen setara Rp 147 miliar lebih.

Terjaganya performa pendapatan daerah, merupakan bagian dari Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 yang disampaikan oleh Bupati Limapuluh Kota pada sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Limapuluh Kota di Ruangan Sidang Utama Kantor DPRD.

Selanjutnya Bupati Safaruddin mengatakan, pelaksanaan APBD 2021 dalam suasana darurat dan melemahnya pertumbuhan ekonomi, yang berdampak secara global dan berdampak secara lokal, termasuk Kabupaten Limapuluh Kota.

Di sisi lain, LPP APBD merupakan tanggung jawab konstitusional pemerintahan daerah sebagaimana diatur Un-



SERAHKAN LAPORAN: Bupati Limapuluh Kota Safaruddin menyerahkan laporan pertanggungjawaban LPP kepada DPRD Limapuluh Kota, Selasa (7/6) lalu.

dang Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD beserta Laporan Keuangan kepada DPRD selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran.

Sementara Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra menyebutkan, akan melakukan fungsi pengawasan secara tegas dan komprehensif dalam pembahasan pelaksanaan APBD 2021.

"Termasuk persoalan pariwisata yang viral belakangan

ini. Kita sudah sampaikan ke pimpinan komisi untuk serius dalam melakukan rapat-rapat kerja dengan mitra OPD masing-masing" ucap Deni.

Kemudian, Wakil Ketua DPRD Syamsul Mikar menyampaikan, apresiasi kepada Bupati Limapuluh Kota atas penyampaian Nota LPP APBD 2021 sesuai jadwal. Nota tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh DPRD Limapuluh Kota sampai ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Pada sisi lain, DPRD juga menyampaikan penghargaan kepada Bupati Safaruddin dan jajaran atas predikat WTP BPK RI. "Kami menyampaikan apresiasi kepada Bupati di masa setahun kepemimpinannya dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 yang mendapat penilaian WTP dari BPK, dan ini untuk ketujuh kalinya kepada Kabupaten Limapuluh Kota," ujar Syamsul Mikar. (fdl)